REFLECTION OF LOCAL WISDOM ON WOMEN'S RIGHTS IN MINANGKABAU INDIGENOUS COMMUNITIES

Sri Yunarti

IAIN Batusangkar

Email: yunartisri67@gmail.com

Muhammad Syakir

Politeknik Imigrasi Depok

Desmita

IAIN Batusangkar

Email:

desmita@iainbatusangkar.ac.id

Elfi

IAIN Batusangkar

Email: elfi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Women in Minangkabau traditional culture are Limpepeh Rumah Nan Gadang which are symbols of the existence of harmonization of households; guarantee of the quality of human resources both in terms of inheritance and descendants, and guarantee of knowledge and availability of family food. This research is conducted in the Minangkabau community within Luhak Nan Tuo area, particularly in the Tanah Datar Regency community. By using the interview method, it reflects three stages of women's position in Minangkabau descriptively. These stages are (1) in decision making to determine assets in the family economy, (2) in the working distribution, and (3) in managing family finances. From the result of the study, it can be seen that the position of women in making decisions is still in the second position even though in the end the women who act as bundo kanduang are still being asked for opinions in terms of protecting reproductive health which indicated in decreasing point. There has been a change in working distribution in which the women are allowed to work not only in domestic sectors but also in public sectors. However, women's position in managing family finances are getting decreased. This is as a result of culture and its values in structural, solidarity, existence of the society. Bundo kanduang institution in Nagari is the basis for empirical empowerment and local wisdom on women's rights. It is just a sub-section of the institution that deals with women's, social, children, youth and women's issues. The social reality where the domestication of discrimination has implications for women. There is still a strong gender bias of community leaders. At least, there are female figures who are able to act as agents for women's empowerment in cultural studies.*

Keywords: *Women's right, local wisdom, and Minangkabau*

PENDAHULUAN:

Hukum adat di Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan

alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Tata hukum adat di Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya seperti tata hukum romawi yang dibawah kolonial Belanda, perbedaan

ini dikarenakan masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya yang mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri yang bersifat riil dan ideal dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.

Memasuki era reformasi setiap komponen bangsa terutama dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan di dalam tubuh pemerintahan sendiri mengalami berbagai perubahan, perbaikan dan pengembangan, semua itu melibatkan banyak pihak terutama kaum muda serta anak kemenakan orang Minangkabau dan khususnya lembaga Bundo Kanduang.

Lembaga Bundo Kanduang adalah lembaga atau wadah bagi perempuan yang memfungsikan dirinya dan berperan aktif dalam kegiatan anak nagari, Bundo Kanduang adalah panggilan untuk perempuan Minangkabau, Pada hakikatnya organisasi Bundo Kanduang bukanlah organisasi profesi, tetapi sebuah wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaannya sebagai *sumarak nagari* dan pelanjut warisan serta menyadari tentang harkat dan fungsi ditengah kontelasi adat dan budaya terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masa depan. Kelompok perempuan di Minangkabau dibawah organisasi Bundo Kanduang jauh berbeda baik dalam gerak langkah maupun program pelaksanaan dan memutuskan suatu perkara.

Perempuan Minang harus segera berada di sektor pendidikan dan pengambil keputusan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya dan adat Minangkabau. Didalam peradaban perempuan Minangkabau

berada digaris depan dan dihulu persoalan keluarga, kaum, dan bangsa, karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dengan segala persoalan dan permasalahan masyarakatnya dan mengaktualisasikan *limpapeh rumah nan gadang, induang-induang ka sarugo*.

Dalam adat Matrilineal Minangkabau kaum perempuan mempunyai status atau pisisi dan peran yang sangat problematik. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya, dan mempunyai tugas yang amat berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya dan pemenuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta memelihara kelangsungan adat.

Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Minangkabau baik sebagai istri maupun ibu dari anak-anak banyak dilibatkan pada tugas-tugas yang domestik, yang dikenal dengan istilah *limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang kasarugo, turun nan kasakali sajo maik, karajo manyulam nan jo manjaik diateh anjuang*, bahkan sampai bentuk tugasnya melebihi laki-laki. Dalam teori kekerabatan adanya sistem kekerabatan matrilineal yang didukung oleh ***Adat Basandi Syarak, Syarakat Basandi Kitabullah***.

Mengenai kekuasaan, dalam masyarakat Minangkabau perempuan mendapatkan posisis yang sama dengan laki-laki bahkan menjadi perdebatan dari kalangan ilmu sosial. Dan simbol-simbol tradisional harus diterjemahkan kembali dengan tepat dan benar sehingga dapat melakukan revitalisasi terhadap posisi, tugas, fungsi, dan keberadaan seluruh

perempuan Minang di dalam adat Minangkabau.

Jika dilihat dari adat matrilineal, status dan peran kaum perempuan Minangkabau menimbulkan kondisi yang dilema. Dikerabat dan kaumnya ia mempunyai status yang tinggi yang dihormati bahkan peran ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kaum laki-laki karena terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak yang diembannya. Kewajiban perempuan Minang yang sangat berat dikerabatnya yang menjadi penopang kehidupan anggotanya berupa tempat tinggal mengelola tanah untuk usaha tani, ladang, yang dikenal dengan pusaka yang harta itu adalah hak kaum perempuan. seecara garis besar bertujuan tulisan ini untuk mengungkap posisi dan peran perempuan dalam kontek budaya, sebagai akses dari adat matrilineal dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini akan dikupas dari berbagai aspek dan siklus kehidupan perempuan. Untuk itu lebih rincinya dapat mengetahui dan mengidentifikasi posisi dan peran perempuan Minangkabau sebagai penentu garis keturunan. Mengelola harta pusaka, konsekwensi budaya terhadap kehidupan keseharian perempuan dan sebagai penentu dan pengambil keputusan dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan diri dan politik.

METODOLOGI

Data yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah dari hasil wawancara dengan Pendekatan yang dipilih menggunakan yuridis normatif dan sosiologis-antropologis mencoba memahami realitas secara mendalam dan holistik, sehingga perhatian terhadap berbagai aspek (perubahan

ruang hidup, perubahan relasi, kelembagaan) akan dilihat secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan. Pendekatan etnografi menggunakan metode kualitatif. **Patton** mengatakan keutamaan metode kualitatif ini adalah adanya data kualitatif terdiri dari deskripsi rincian tentang situasi, peristiwa, orang, interaksi dan mengamati perilaku sikap keyakinan dan pikiran.

Untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan pada hak-hak perempuan Minangkabau digunakan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Lukah Nan Tuo yaitu Kab. Tanah Datar yang terdiri 14 Kecamatan 75 Nagari

PEMBAHASAN

1. Posisi Perempuan Dalam Kontek Budaya

Dalam system matrilineal perempuan di posisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan harta, sebagaimana diungkapkan dalam pepetah adat *ambun puruik* artinya tempat penyimpanan. Itulah sebabnya dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat perempuan tidak diikuti sertakan. Perempuan menerima bersih saja tentang hak dan kewajiban di dalam adat telah di[utuskan terlebih dahulu oleh laki-laki yang disebut dengan *ninik mamak*. Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Dalam bidang ekonomi semua harta pusaka menjadi milik perempuan dalam bentuk pengelolaan, sedangkan laki-

laki di beri hak untuk mengatur dan mempertahankannya baik dari segi keamanan dan kekacauan di luar kekeluargaan Minangkabau suku yang berbeda dengan suku lainnya dalam sisitem kekeluargaan serta bentuk kekerabatannya, karena dalam pengambilan sesuatu berdasarkan pada garis keturunan ibu lawan dari garis keturunan ayah(Patrilineal).

Pembuatan ranji keturunan berdasarkan pada keturunan ibu, jika ibu bersukukan koto, piliang maka si anak di nasabkan pada suku ibu dan beritu seterusnya.pada garis keturunan ayah di minangkabau juga tetap diakui dengan istilah bako, induak akan tetapi membuat ranji keturunan tetap pada garis keturunan ibu hal ini tetap diakui dan di jaga dalam adat minangkabau. Matrilineal atau garis keturunan adalah merupakan wujud dari kemuliaan kaum ibu, karena ibulah tempat tumbuhnya generasi dan melahirkan, membesarka, medidik anak sebagaai generasi seterusnya. Ranji dalam kaum ibu harus ada dan di pegang langsungnoleg perempuan yang dukenal dengan istilah bundokanduang. Pada saat tertent, jika musyawarah kaum ranji harus dipertahankan. Yang terpenting bagaimana ranji itu juga harus di perhatikan. Dan ranji ini juga dimiliki oleh paruik-paruik lain yang juga sudah berkembang. Sehingga pada saat tertentu jika ada terjadi sengketa kekerabatan baik dalam bidang pertanahan yang dikenal dengan harata pusaka(Pusako) tinggi dalam suatu kaum itu sendiri. Jika ranji dimiliki masing-masing parui, akan sangat mudah menyelesaikannya.sebaba bundo kanduang yang *menyesaikan nan kusuik, jiko karuah kamanjaniahan, pai tampek batanyo pulang tampek babarito.*

Seorang ibu pada khususnya pada anak perempuan, maka jika terjadi yang rusak akan martabatnya sebgai mana pepatah mengatakan “*kalau karuah ai di hulu, karuah juo sampai kamuaro, kalau induak nyokurian makao rintiak anaknyo, tuturan aia jatuh ka palambaian juo.*”(Wawancara, anggota bundokanduang SY)

Ungkapan panggilan wanita dengan perempuan mempunyai perbedaan artinya dala istilam adat minangkabau. Dengan menggunakan panggilan ***Padusi*** untuk penyebutan panggilan seorang perempuan, berbeda dengan seorang perempuan dalam kondisi bayi yang belum di beri nama dengan menggunakan panggilan ***si.Upiak***, bila anak perempuan telah mulai remaja yang telah diberi orang tua nama maka ia dipanggil dengan gadih puti bungsu. Bila perempuan sudah bersuami dan mempunyai anak ia di panggil bundo, mande, amai. Bundo kanduang panggilan ini menunjukkan adanya sopan santun dan tetib yang memakai basobasi tahu dengan kiasan dan kata sindiran, mejauhi sumbang dan salah, mulut manih dan disenagi, pandai bergaul semuanya diistilahkan *dengan ereng jo gendeng dan mengerti pado nan ampek.*

Bila diterjemahkan kata Bundo Kanduang, maka dapat dimaknai antara lain: *bundo* berarti ibu, sedangkan *kanduang* berarti kandung atau sejati. Dalam legenda dan Tambo Minangkabau, yang dikategorikan ke dalam mitos, Bundo Kanduang dilambangkan sebagai seorang perempuan pemimpin yang arif dan bijaksana. Panggiln bundo kandung juga ditujukan pada kelompok wanita yang mendampingi penghulu dala sebuahaa acara adat. Baik dalam Nagarai atau acara-acara pemerintahan. Begitu juga dalam struktur pemerintahan Nagari, bundo

kandung merupakan bagian dari KAN (Kerapan Adat Nagari). Disamping itu pula bahwa organisasi bundokandung ini adalah independen atau badan otonom tersendiri dalam menjalankan organisasi kenegarian..(Wawancara, bundo Ros,kamang magek)

2. Fungsi Bundo kandung

Dalam masyarakat adat minangkabau yang bersuku matrilineal. Bundo kandung mempunyai fungsi. Hal tersebut tercermin dalam pepatah adat sebagai berikut:

- **Limpapeh Rumah Nan Gadang/Tiang Utama Rumah Gadang)** Bergerak bebas didalam keluarga kaumnya untuk mengayomi kaumnya. (ibu yang berfungsi sebagai penyanggah dari extended family).Limpapeh maksudnya tonggak tuo yang terletak ditengah-tengah rumah gadang.Kalau tonggak tuo itu kokoh maka selamatlah rumah itu,tapi kalau goyah atau kurang kuat akan berakibat rumah itu roboh.senada apa termaktup dala hadis Nabi artinya Perempuan tiang Negara baik perempuan baik Negara rusak perempuan rusak Negara.
- **Amban Puruak Pagangan Kunci, Amban Puruak Aluang Bunian.** Diberi kepercayaan dan kewenangan memegang kunci rangkiang (sako jo pusako)sako ;pemilikan kaum yang dimiliki waris keturunan ibu/gelar.
- **Pusek Jalo Kumpulan Tali.** Perempuan sebagai inti dari jaringan perkauman,perempuan yang melahirkan keturunan dari generasi ke generasi
- **Sumarak dalam Kampuang Hiasan dalam Nagari.** Menjadi marwah kampung dan nagari, membuat negeri jadi meriah dan menjadi hiasan katagak nagari

mamaga nagari,barek samo dipikua ringan samo dijinjiang.

- **Kok Iduik Tampek Baniek, Kok Mati Tampek Banasa.** Nan gadang basa batuah (pembesar yang sakti) Kok hidui tampek basanda (kehidupannya sumber segala keinginan) - Kok mati tampek baniaik (kematianannya menjadi sumber segala niat)
- **Ka- Unduang-Unduang ka Madinah, Ka Payuang Panji ka Sarugo.** Perempuan menjadi pengayom ,pengawas dan penentu di dunia dan akhirat. Ka undang-undang ka Madinah (Menjadi perlindungan ke Madinah- Ka payuang panji ka sarugo (menjadi payung besar menuju surga) (Idrus Hakimi, 1997).
- **Kapai Tampek Batanyo ,Kapulang Tampek Babarito.** Perempuan sebagai penentu arah//penasehat, perempuan menjadi hulu dan muara dari persolalan kaumnya

3. Sifat-sifat dan martabat perempuan minangkabau sebagai berikut:

Perempuan merupakan panggilan padusi minang yang akan menjadi suri tauladan dalam kampung dan Nagari, dari perempuan ini lah akan lahir wanita-wanita terbaik, padusi yang bermartabat memakai sifat-sifat dan bermartabat di sannganyaantara lain:

a. Bersifat Benar

Bundo Kandung haruslah memiliki sifat yang benar, yang selalu tercermin dalam perbuatan dan pergaulan sehari-hari. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan dan tingkah laku. Selalu mendidik lingkungannya dengan sifat-

sifat kebenaran, berpihak serta selalu menegakkan dan memperjuangkan kebenaran.

b. Bersifat Jujur, Dipercaya Lahir dan Batin

Bundo Kandung harus bisa dipercaya, menjauhi sifat pendusta. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menghindari sifat telunjuk lurus kelingking berkait.

c. Bersifat, Cerdik, artinya mengetahui mudharat dan manfaat, untung dan rugi, sumbang dan salah. perempuan haruslah berilmu pengetahuan dalam rumah tangga dan lingkungan, berpengetahuan tentang pendidikan, adat istiadat dan juga agama.

d. Pandai Berbicara, Sifat ini penting bagi seorang Bundo Kandung sehubungan dengan fungsinya sebagai pendidik baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat di korong dan kampung.

e. Mempunyai Sifat Malu. Sifat malu adalah bagian dari ajaran Adat minangkabau. Kalau seseorang tidak memiliki sifat malu maka orang tersebut dikatakan tidak beradat. Malu adalah sifat yang dianugerahkan Tuhan di dalam diri manusia yang beriman dan bertaqwa.

Sifat-sifat yang disyaratkan dalam Adat Minangkabau yang harus dimiliki oleh seorang perempuan di Minangkabau. Jika setiap perempuan memiliki sifat-sifat yang demikian maka sangatlah tepat memuliakan kaum perempuan dan menempatkannya diposisi yang terhormat. Dengan sendirinya masyarakatpun akan menghormati

harkat dan martabat kaum perempuan. Tanpa harus meneriakkan agar mendapatkan perlakuan yang baik.

4. Tugas Bundo Kandung:

Manurui alua jo patuik, bajalan luruh bakato bana Manampuah jalan nan pasa, indak bisa kunyik dek kunyik, lamak dek santan. Mamaliharo harto pusako, hemat, cermat, tidak boros, jan gadang pasak dari pado tiang, Mamaliharo anak keluarga dan kaum kerabat. Tidak berpikir dan mau berobah tatanan adat, apalagi mau keluar dari adat. Selalu berusaha menjadi Aktual dan eksistensi, dalam berperan sebagai lazimnya pengayom anak kemenakan dan anggota kaumnya yang masih berada di kampung maupun yang sudah pergi merantau. Tidak pernah meras asing dengan sesuatunya yang baru, mereka berusaha belajar dan mempelajari apa-apa yang belum diketahui. Tidak pernah merasa dipinggirkan oleh kaum laki-laki, karena mereka mendapat perlindungan, kedudukan dan haknya secara jelas dan pantas, baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan dari keturunan/(Hasil wawancara, Bundokandung seluruh kab. Kota dari ranah penelitian: Agus, 2018)

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik pemahaman bahwa peranan perempuan dalam keluarga (kaum), rumah tangga, serta masyarakat yang lebih khusus *pertama*, Peranan perempuan di dalam dan diluar rumah gadang atau rumah yang berhubungan erat dengan kebudayaan, sebagai suatu masyarakat yang materilineal, yaitu dalam pola hubungan kekerabatannya. *Kedua* Besarnya peranan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, keluarga (kaum), separuik, dan nagari. Dengan memperhatikan kewenangan keluarga

terhadap rumah tangga dan sebaliknya, serta sumbangannya terhadap kehidupan masyarakat nagari, dusun, yang saling membela dan membahu baik suka dan duka. Dalam pepatah dikenal dengan sebutan: Kaba baik baimbauan (Kabar baik di panggil) Kaba buruak baambauan (Kabar buruk berdatanga)

4.Konsekwensi Budaya terhadap posisi Perempuan dalam pengambilan Keputusan

Perempuan Minangkabau dilambangkan dengan predikat "*bundo kanduang*".Dia adalah figur sentral dalam keluarga. Bundo kanduang, dalam artian ideal abstrak filosofisnya, bahkan pada hakikatnya adalah nilai-nilai kewanitaan Minangkabau itu sendiri, terhadap mana setiap wanita Minangkabau dalam bersikap dan berperilaku berusaha ideal abstrak filosofis itu, perlambang dan sekaligus personifikasi dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri, yang sifat dan ciri khasnya memang adalah matrilineal (Naim, 1991: 68). Namun demikian, secara empiris citra, kedudukan dan nasib perempuan di Minangkabau terletak pada figur "Bundo Kanduang" dan Figur pertama merupakan lambang kekuatan wanita, sedangkan figur kedua mencerminkan ketidakberdayaan wanita di bawah kekuasaan laki-laki, akan tetapi memanglah demikian kenyataannya, bahwa dalam masyarakat Minangkabau kedudukan wanita bervariasi menurut statusnya dalam keluarga, hanya sosok ibulah yang memberi arti penting bagi kedudukan wanita dan posisinya dalam masyarakat.

Sementara wanita yang belum kawin nasibnya tetap ditentukan oleh laki-laki yang berperan sebagai mamak

(Wawancara: **GN**(Ketua Bundo Kanduang Tanah Datar)). Bagi orang Minangkabau yang memegang konsepsi Miangkabau secara kuat dikatakan bahwa dalam pengertian idealnya, wanita Minangkabau mengandung poin-poin selektif yang mencerminkan kekuatan dan kedudukannya yang sangat tinggi dalam masyarakat. Bundo kanduang (wanita) dalam konteks ini dikatakan sebagai figur sentral masyarakat kepada dialah keseluruhan sistem dari kehidupan sosial matrilineal dikonsentrasikan (Wawancara: **SF**(Sekretaris Bundo Kanduang Tanag Datar). Sebuah pendapat lain menyatakan bahwa wanita Minangkabau tidaklah pernah benar-benar mendapatkan statusnya penuh sebagai bundo kanduang. Kalaupun bundo kanduang itu benar ada, ia hanya tidaklah lebih sebagai simbol, dalam prakteknya laki-lakilah yang berkuasa dan mengontrol semua yang terjadi dalam sistem pemerintahan Minangkabau (Thaib, 1990: 5).

Pada umumnya masyarakat minangkabau menganggap seseorang yang berusia antara 5-15 tahun sebagai anak-anak. Pada masa ini pendidikan anak itu tergantung kepada orang tuanya, tetapi peranan yang utama terletak pada perempuan (ibu). Pola peranan perempuan disini terhadap proses pendidikan dalam arti luas atau proses sosialisasi, hampir seluruhnya terletak ditangan perempuan, perenannya sebagai ibu segala pekerjaan dan seluk beluk kebutuhan hidup keluarga. Secara domestic ditangan perempuan, rumah gadang terpusatnya hubungan dengan seluruh kelompok kekerabatan, anak mengenal mamak,nenek laki-laki dan seluruh laki-laki di rumah gadang yang tinggal

di rumah isteri masing-masing pada waktu diadakan upacara-upacara adat. Dan adakalanya pada waktu hari-hari besar. Pertemuan ini dapat terjalin dengan kerabat se-rumah gadang. Saat inilah anak mengenal mamak, bako, anak pisang, *ipar bisan*.

Kelompok kekerabatan dalam masyarakat adat minangkabau antara seotang individu dengan anggota masyarakatnya di nagari terdapat tiga lembaga kemasyarakatan yang berarti bagi kehidupannya, yaitu kelompok *semandeh* (Satu Ibu), *saparuik* (satu jurai, dan *sakampung*), *semasa kecil* org yang dekat dengannya adalah *sebak*, *seibu* dan saudara-saudaranya. Hidup dalam satu rumah gadang berbaur sesama saudara ibu *semandeh*. Keterlibatan perempuan dalam proses pendidikan dan sosialisasi terhadap anak ini dapat dimengerti bahwa sebaik-baiknya kedudukan perempuan dalam budaya minangkabau dengan mempelajari hubungan antara kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai masyarakat matrilineal. Terkait dengan mempunyai sifat dan karakter penentu, titik tumpuan hubungan dan penjaga keseimbangan dalam kaumnya (Wawancara: Sf: selaku sekretaris Bundo kanduang Tanah Datar).

Proses pendidikan dan sosialisasi terhadap anak laki-laki dan perempuan ada bedaan kecil yang mengarah pada perbedaan jenis kelamin dan sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga anak laki-laki diharapkan sebagai pagar (*potential son in law*) yang akan menjaga kelangsungan kerabat itu. Disamping pendidikan formal. Anak laki-laki di bawa oleh bako, ia mendapat tempat yang bebas sementara dalam kaum ibunya ia terbatas dan kurang dapat perhatian selayaknya anak yang membutuhkan tempat

bermain di halaman, ia menjaga ketenanga bagi bapak (kecil atau tua) suami saudara ibunya. Berbeda dengan anak perempuan diharapkan sebagai penerus penghuni rumah gadang yang kelak diharapkan “tempat meminta Air” oleh laki-laki dikala haus. Sedari kecil anak perempuan sudah dibiasakan bekerja sama dengan saudara-saudara yang *semandeh*.

Adat Matrilineal di Minangkabau kaum perempuan mempunyai status dan peran yang sangat problematik. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya, dan mempunyai tugas yang amat berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya dan pemenuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta memelihara kelangsungan adat.

Masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut masyarakat minangkabau dan institusi perempuan merupakan salah satu mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Untuk mencegah berlanjutnya masalah batas sepadan hukum keluarga. Kajian hukum keluarga dalam adat hukum Minangkabau ruang lingkupnya membicarakan tentang perkawinan dan hak kepemilikan baik dalam lingkungan keluarga kecil maupun dalam keluarga besar yang terkenal dengan istilah Pusako tinggi dan hak atas tanah Pusako Rendah, adapun pengertian dari perkawinan menurut adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan dalam adat matrilineal yang menganut garis keturunan ibu yang dikenal dengan istilah *perempuan*. Sedangkan Harta Pusako tinggi adalah harta yang sudah

dimiliki kaum, hak penggunaannya secara temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Sedangkan pengertian Harto Pusako Rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan di atasnya. (Nurullah, 1999:126)

Masalah-masalah di atas diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat (Amir MS, 2003:67) para Ninik, atau fungsionaris adat. Apabila masalah inisial tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini ditempuh. Peran Ninik Mamak atau fungsionaris adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa keluarga. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak terdapat didalamnya perkumpulan perempuan yang dikenal dengan Bundo Kanduang,

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa hukum keluarga, ada yang berpendapat sebaiknya permasalahan cukup diselesaikan oleh Bundo Kanduang setempat. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, teori yang digunakan merupakan teori yang berada dalam ranah *social-legal*. Menurut **Peter Beilharz**, teori-teori sosial diperlukan untuk menjelaskan norma-norma, nilai-nilai, etika dan politik, oleh karena itu teori-teori sosial diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada sehingga ditemukan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif.

Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian dan memperlancar interaksi sosial didalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara wargamasyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan suatu keserasian dalam hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan. **Bredemeier** (1962) modifies Parson's concepts in three ways:

1. *The legal system is treated as the integrative sub-system of society.*
2. *The adaptive sub-system of modern society is treated as wider than the economy and refers to all problems of scientific or technological adaptation to the environment.*
3. *Bredemeier seems to adopt Lewellyn's view that dispute resolution is the central element in law's integrative function, so his analysis of law focuses on courts.*

Bredemeier menempatkan lembaga Bundo kanduang sebagai pusat kegiatan kerja hukum. Hukum menerima asupan (*input*) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran (*output*) yang dikembalikan kepada masyarakat. Apabila institusi hukum hendak berfungsi sebagai sarana masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, pekerjaan hukum serta hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Peraturan dapat berfungsi secara efektif dan disegani atau ditaati apabila terdapat ikatan psikologis dengan para pengemban peraturan itu sendiri. Dari konsekuensi aturan budaya minangkabau ini dapat dilakukan suatu pemberdayaan diantaranya:

Petama : Pemberdayaan Institusi: Secara teoritis pemberdayaan akan lebih efektif bila dimulai dari pemberdayaan institusi. Transformasi institusi bukan hanya meningkatkan kondisi material perempuan tetapi juga berubahnya praktik institusi. Artinya, untuk pemberdayaan perempuan sistem dalam struktur sosial juga harus berubah, Transformasi institusi juga berarti merubah aturan main baik aturan yang tertulis walaupun aturan yang tidak tertulis. Pemberdayaan institusi adalah upaya untuk melegalisasi atau menstrukturisasi nilai atau praktik-praktik sosial sehingga mempunyai kekuatan yang memaksa dan mengikat. Pemberdayaan institusi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: Nagari menetapkan visi dan misi yang mencerminkan kepedulian terhadap kondisi dan posisi perempuan di nagari, Nagari mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan nagari, Nagari menginisiasi data terpilah secara gender, Nagari menetapkan aturan tentang representasi perempuan dalam setiap lembaga-lembaga nagari, dan dalam setiap rapat pengambilan keputusan di tingkat nagari, Nagari menetapkan aturan tentang hak-hak perempuan terhadap tanah ulayat, Nagari menetapkan aturan tentang hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian

Kedua: Pemberdayaan Nilai-nilai (Kultural) Tidak dapat dipungkiri manusia hidup dalam budaya dan nilai-nilai yang mereka ciptakan untuk kemudian mengikatkan diri dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam bertindak. *Bourdieu* menyebutnya dengan *habitus*. Bagi peneliti gender yang menjadi

pertanyaan adalah siapa dan untuk kepentingan apa nilai-nilai tertentu diciptakan dan dilestarikan. Mengapa ada kelompok-kelompok tertentu yang dirugikan dalam relasi sosial karena nilai-nilai tersebut. Para sosiolog Feminis menggunakan konsep patriarkhi dalam menganalisis relasi sosial (relasi gender) di dalam masyarakat yang mencenninkan kekuasaan dan dominasi laki-laki yang disebabkan oleh gender. *Gender is a way in which social practice is ordered*. Pernyataan tersebut bermakna bahwa gender mempunyai peran penting dalam menentukan dan mengartikan praktik-praktik sosial di dalam suatu masyarakat (keluarga, negara). Oleh karena itu pemberdayaan perempuan yang telah dimulai dengan pemberdayaan institusi harus dibarengi dengan pemberdayaan kultural. Artinya, perlu ditumbuhkan nilai-nilai yang mendukung transformasi struktural.

Masyarakat Minangkabau pada dasarnya nilai-nilai kesetaraan sudah menjadi filosofi kehidupan yaitu "duduk sama rendah, tegak sama tinggi". Oleh karena itu perlu dikembangkan suasana yang kondusif yang memungkinkan perempuan bisa diterima sebagai *equal partner* oleh laki-laki di dalam kehidupan masyarakat nagari. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut :

1. Menggali nilai-nilai kesetaraan dalam budaya Minangkabau dan menjadikannya sebagai nilai ideal dalam pembangunan budaya nagari
2. Mendorong elit-elit adat dan agama untuk mengembangkan nilai-nilai kesetaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Tokoh adat dan tokoh agama merupakan agen yang sangat penting dalam merubah kultur

3. Mendorong tokoh-tokoh perempuan untuk menjadi role model dalam mengembangkan nilai-nilai kesetaraan

Ketiga: Pemberdayaan Organisasi. Secara khusus organisasi perempuan yang ada di nagari haruslah menjadi motor bagi upaya pemberdayaan perempuan. belum produktif sebagai organisasi perempuan. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan organisasi dalam pengertian memampukan kedua organisasi ini sehingga mampu bertindak secara optimal sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan nagari. Upaya pemberdayaan organisasi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: Organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas Organisasi harus mempunyai program dan kegiatan yang definitif yang mengintegrasikan isu-isu gender yang relevan dengan kebutuhan perempuan dalam masyarakat nagari. Peningkatan kapasitas kepemimpinan pengurus organisasi Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus organisasi tentang berbagai hal terkait dengan isu-isu gender Organisasi Bundo Kanduang harus menjadi pusat bagi penguatan posisi perempuan Minangkabau, oleh karena itu organisasi ini harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk itu.

KESIMPULAN

Posisi perempuan dalam keluarga menjadi orang pertama dalam bidang domestik sistem yang dibangun dalam lingkungan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan keturunan. Pemahaman peran dan posisinya

dalam keluarga dilihat pada kesetaraan yang persial, kodrat, mutlak dan pragmatis. Akan terwujud posisi perempuan pada aktualisasinya sebagai istri dan ibu dan juga pada bidang pekerjaan dan mengerjakan. Posisi dalam hal pengambil keputusan perempuan yang dikenal dengan bundo kandung terletak pada nomor dua, akan tetapi tetap diminta pendapat dari perempuan bila mengambil keputusan. artinya sistem kekuasaan masih didominasi kelompok laki-laki dalam hal ini disebut dengan Mamak/Datuak. Dalam bidang ekonomi terlihat menurun karena harta yang akan dikelola oleh perempuan memang sudah semakin menipis. Dalam pembagian pekerjaan perempuan sudah mendapat izin untuk dapat berkembang dalam bidang public, tidak semata pada posisi domestik saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qadri Azizy.2002. *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gema Meida
- Abdul,AzizDahlan, 1996 *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Abdurrahman, (1992) *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Akademika Pressindo
- Adeney, Bernard T. (2004). *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius. Anh, T.T. (1984).
- Armaini, *et. al*, 2004, *Budaya Alam Minangkabau*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

- Arso Sosroatmojo dan A Wasit Aulawi, (1978), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Asnan, Gusti, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: PPIM, 2003, 8-10.
- Becker, Theodore L. 1978. *Comparative judicial Politics, The Political Functioning of Courts*, London: Oxford University Press
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Lslam*, kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, Jurnal perspektif Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September
- Bushar, Muhammad, 1998, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Deddy Ismatullah. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djubaedah, Neng, *et al*, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005
- Efend, Satria, 2004, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana,
- Ehrlich, Eugen. 1985. Dalam Soerjono Soekanto. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- John. 1995. *Forces and Mechanisms in the Constitution Making Process*, dalam *Duke Law Journal*.
- Evi Djuniarti, (2017) *hukum harta bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan kuh perdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember
- Gazalba, Sidi, 1969 *Konflik Antara Adat, Agama dan Pengaruh Adat* Padang: Seminar Islam di Minangkabau,
- Gibb, H.A.R. 1993. *Aliran-Aliran Modern dalam Islam*, terj. Machnun Husain, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gusti, Asnan, 2003, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: PPIM,
- Hakimi, Idrus Dt. Rajo Penghulu, 1978 *Pokok-Pokok Pengetahuan Alam Minangkabau*, Bandung: CV Rosda,
- Hamka, 1929 *Sejarah Minangkabau dengan Islam* Fort de Kock: Miratul Ikhwan,
- Hamzah, Alirman, 2003 *"Urang Ampek Jinih"*, Ensiklopedi Minangkabau, ed. Duski Samad Jakarta: Gebu Minang, 2003
- Herawati, Andi. (2011) *Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Desember 2011: 321-340, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Makassar.
- Husen Bin Abd Aziz Ali Syeikh, 1426 H. *Al-Mabadi al-Qadhaiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Irtibath al-Nizham al-Qadhai fi Mamlakah al'Arabiyyah*. Jedah: Tihamah
- Husen bin Abdullah. 1983. *Al-Tanzimi al-Qadhai fi al-*

- Mamlakah al-Arabiyyah* Jeddah : Tihamah Saudi Arabia
- Ibnu Ruysd, (tt), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid Beirut*: Dar Ihya'al-Kitab 'Arabiyyah,
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009 *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia,
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016
- Lev, Dainel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenamhungan dan Perumahan*, terj. Nirwo dan AE. Priyono, Jakarta: LP3ES.
- Luthfi, Amir, 2011, *Hukum & Perubahan Struktur Kekuasaan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942*, Pekan Baru: Suska Press
- M.S, Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011
- Mahyuddin, Suardi, 2009 *Dinamika Sistem Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, [t.tp]: PT Candi Cipta Paramuda.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____ & Solatun. Navis, A.A, 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT Grafiti Pers,
- Ramdani Wahyu S. 2011. *Teori dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*. Bandung: Diserfasi Pascasarjana UIN SGD Bandung
- Rasyid, As'ad, Abd, (2010). *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Samad, Duski, "Tradisionalisme Islam di Minangkabau: Dinamika, Perubahan dan Kontinuitasnya", Tajdid: Jurnal Nasional Ilmu-ilmu Ushuluddin Juli 2003, vol 6, no.2
- Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1983),
- Syarbaini, Muhammad al-Khatib, (1997), *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifa
- Syarifuddin, Amir, (2009) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau* Desertasi UIN Jakarta, 1982
- Thalib, Sayuti, (1986,) *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press

Zuhaily, Wahbah,(1989), Fiqh al-
Islamy wa
Adilatuhu,Damaskus,Da al-
Fikr Arikunto,

Suharsimi,*Teori, Metode dan
Pemelitian Hukum Normatif*,
Malang: Bayumedia
Publising, 2007